

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Knowledge Sector Initiative (KSI)
Tahap I di Sulawesi Selatan

Media Briefing – 16 Mei 2019

Temu Wicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan – 17 Mei 2019

Lokakarya Pengembangan Pengetahuan untuk Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti –
17 Mei 2019

NOT FOR FURTHER CIRCULATION

Daftar Isi

A.	SEKAPUR SIRIH.....	2
B.	LATAR BELAKANG	3
C.	DESKRIPSI KEGIATAN.....	6
D.	PELAKSANAAN KEGIATAN	7
a.	Media Briefing – Ruang the Wrapped Hotel Four Points by Sheraton, 16 Mei 2019, pukul 16.30-19.00 WITA.....	7
b.	Temu Wicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan – Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 17 Mei 2019, pukul 09.00 WITA.....	7
c.	Lokakarya Pengembangan Pengetahuan untuk Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti: Mendukung Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan - Ruang The Wrapped Hotel Four Points by Sheraton, 16 Mei 2019, pukul 16.30-19.00 WITA.....	8
E.	RENCANA TINDAK LANJUT OLEH KSI	17

NOT FOR FURTHER CIRCULATION

A. SEKAPUR SIRIH

KSI mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bappenas, Konsul Jenderal Australia di Sulawesi Selatan, DFAT dan Yayasan BaKTI atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan kami di Sulawesi Selatan. Kami juga berterima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, universitas, organisasi masyarakat sipil, asosiasi pengusaha dan media yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kami.

Dokumen ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pertemuan dengan Awak Media, Temu Wicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan Lokakarya Pengembangan Pengetahuan untuk Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti yang diselenggarakan di Makassar, tanggal 16-17 Mei 2019 yang lalu.

Ini merupakan langkah awal, bagi upaya kami mendorong penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dan mendukung upaya penelitian yang lebih berkualitas untuk penyusunan kebijakan di Sulawesi Selatan, bersama para pemangku kepentingan setempat dan mitra-mitra KSI.

Menindaklanjuti kegiatan di atas, KSI sedang melaksanakan kegiatan pengadaan untuk mendapatkan sebuah organisasi profesional yang berbasis di Sulawesi Selatan untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

B. LATAR BELAKANG

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sejatinya perlu didukung oleh pertimbangan yang didasarkan pada hasil-hasil riset sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran. Namun secara umum, penggunaan hasil-hasil riset untuk penyusunan kebijakan di Indonesia masih belum konsisten. Seringkali, kebijakan publik disusun berdasarkan apa yang sedang populer dalam jangka pendek dan bukan berdasarkan kebutuhan jangka menengah dan panjang. Bahkan kebijakan publik cenderung ditetapkan hanya berdasarkan intuisi, opini, dan kepentingan sektoral.

Di sisi lain, banyak penelitian yang dilakukan, baik oleh para akademisi, badan penelitian dan pengembangan pemerintah (balitbang) maupun lembaga non-pemerintah, dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Penggunaan basis riset sering dianggap memakan waktu, sedangkan pembuat kebijakan biasanya membutuhkan data dan analisis yang cepat. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak menghasilkan dampak optimal yang diharapkan.

Tidak semua kebijakan publik dibuat berdasarkan telaah yang baik mengenai perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, atau kelompok masyarakat yang marjinal seperti anak-anak atau orang dewasa yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Padahal Indonesia telah mempunyai berbagai aturan dan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat mengawal penyusunan kebijakan publik dan pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih sensitif terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial (*Gender Equality and Social Inclusion/GESI*), tetapi selama ini belum digunakan secara optimal. Berbagai riset terkait GESI telah banyak dilakukan oleh lembaga penelitian dan universitas, namun belum sepenuhnya digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan untuk menghubungkan dan membangun kolaborasi antara berbagai aktor termasuk peneliti dan pembuat kebijakan. Upaya intermediasi ini tidak saja perlu dilakukan di tingkat nasional, namun juga di daerah, karena penyusunan kebijakan pembangunan dan implementasinya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat subnasional.

Inisiatif Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*)

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah program kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung penggunaan bukti yang lebih baik dalam penyusunan kebijakan di Indonesia. KSI didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

KSI mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, data dan analisis yang baik. KSI bekerja dengan penyedia hasil penelitian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat relevansinya sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk meningkatkan regulasi dan praktik yang mendukung

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

penelitian berkualitas dan membuat penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.

Tujuan umum KSI adalah untuk meningkatkan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan pembangunan, dengan titik berat pada:

1. Komunikasi penelitian kebijakan yang berkualitas lebih baik dan lebih efektif
2. Alokasi anggaran yang lebih besar dan lebih baik untuk mendukung penelitian kebijakan; dan
3. Pengelolaan, ketersediaan, dan akses data dan informasi yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan

Kegiatan KSI diarahkan untuk mencapai lima hasil (*outcome*) pada tahun 2022, yakni:

1. Para pembuat kebijakan memiliki cara untuk mendanai penelitian kebijakan sehingga mereka bisa mendapatkan bukti yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan;
2. Para peneliti dan dosen di universitas mendapatkan insentif yang lebih baik untuk menghasilkan penelitian kebijakan yang berkualitas;
3. Para peneliti, analis kebijakan, dan pembuat kebijakan berkomunikasi secara lebih teratur untuk berbagi pengetahuan, berdialog mengenai kebijakan dan melakukan penelitian bersama;
4. Rencana dan anggaran pembangunan didasarkan pada data yang memiliki kualitas yang lebih baik; dan
5. Lembaga penelitian yang berpartisipasi mengalami kemajuan dalam pendanaan yang berkelanjutan dan merupakan kontributor penting bagi kebijakan yang berdasarkan bukti di Indonesia.

Pendekatan keseluruhan KSI adalah bertindak sebagai katalisator perubahan. Ini berarti bahwa tugas KSI berfokus pada menyatukan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan masalah, mengembangkan solusi bersama, dan bekerja sama untuk mengimplementasikannya. KSI juga bekerja dengan para mitranya untuk mengembangkan pengetahuan baru dan membagikannya pada khalayak yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan perdebatan, dan memobilisasi dukungan yang lebih luas untuk perubahan. Untuk memastikan bahwa perubahan itu berkelanjutan, KSI bekerja untuk memperbaiki sistem dasar yang mendukung penggunaan bukti yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan.

Mitra KSI antara lain meliputi lembaga pemerintah, organisasi penelitian dan advokasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi dan ilmiah. Mitra utama KSI di tingkat pemerintah pusat adalah Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Lembaga Administrasi Negara. KSI juga bermitra dengan 16 Lembaga Riset Kebijakan (*Policy Research Institute/ PRI*)¹.

¹ AKATIGA, Article 33, CSIS, CWI, ELSAM, IRE, KPPOD, PKMK UGM, PPIM-UIN Jakarta, PSHK, PUSAD, PPH Unika Atma Jaya, Sajogyo Institute, Seknas FITRA, SMERU dan SurveyMETER.

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

Hingga tahun 2018, KSI telah berkontribusi pada tercapainya sejumlah perubahan pada sektor pengetahuan di Indonesia, misalnya Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang memungkinkan Organisasi Sosial Masyarakat (Ormas) untuk menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. KSI telah berkontribusi dalam upaya penataan balitbang, penyusunan RUU Sisnas Iptek yang tengah dibahas di DPR, reformasi Hibah Riset di Kemenristekdikti dan terbitnya Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Indonesia Development Forum, sebuah konferensi pembangunan yang penting sebagai wadah interaksi berbagai aktor pembangunan yang diselenggarakan sejak tahun 2017, mulai tahun 2019 telah didanai oleh Bappenas. Bekerja sama dengan LAN, KSI mempromosikan peran analisis kebijakan sebagai mitra bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam menerjemahkan hasil-hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan. KSI mendukung KRISNA, suatu sistem informasi perencanaan dan penganggaran nasional. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dikembangkan Bappenas dan SMERU Institute juga mendapatkan dukungan dari KSI.

Pada tahun 2018, KSI mulai berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperkuat sektor pengetahuan di tingkat subnasional. Salah satu kolaborasi KSI dengan pemangku kepentingan di daerah pada tahun 2018 adalah kerja sama dengan Yayasan BaKTI, Lembaga Administrasi Negara dan koordinasi dengan Bappeda dan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menyelenggarakan sejumlah kegiatan di Makassar, yaitu: Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan dan Bimbingan Teknis mengenai Indeks Kualitas Kebijakan. Dalam Forum Festival Kawasan Timur Indonesia, KSI bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan AKATIGA melaksanakan sosialisasi Swakelola Tipe III yang membuka kesempatan bagi Organisasi Masyarakat Sipil untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018. Kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung baik dan mengundang banyak perhatian dari para aktor pengetahuan di Sulawesi Selatan.

Keberhasilan penyelenggaraan berbagai kegiatan di Sulawesi Selatan meyakinkan KSI untuk melanjutkan perannya sebagai katalis dan mempromosikan perubahan sistemik pada sektor pengetahuan dan perbaikan kebijakan di daerah. Peran ini dilaksanakan melalui kegiatan subnasional yang dibangun dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra dan jaringan aktor pengetahuan di daerah.

Kegiatan subnasional KSI pada tahun 2019 dipusatkan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan banyak lembaga riset kebijakan mitra KSI telah melakukan riset kebijakan di Sulawesi Selatan dan potensi kolaborasi antara KSI dengan program-program DFAT lainnya, termasuk *Partnership for Australia-Indonesia Research* (PAIR) yang telah dimulai kegiatannya tahun ini. Di samping itu, KSI juga dapat membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lain yang memiliki kapasitas yang mumpuni di Sulawesi Selatan seperti Universitas Hasanuddin dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), serta mengeksplorasi pelibatan dunia usaha.

Upaya Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti di Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan selama ini cukup aktif dalam menghasilkan produk pengetahuan. Salah satu contohnya adalah pada awal tahun 2019, Balitbangda merilis hasil penelitian terkait empat produk unggulan daerah yang sedang dikembangkan untuk diajukan dalam pengembangan inovasi yaitu kopi, rumput laut, gula aren dan garam. Pemerintah Sulawesi Selatan akan menyusun regulasi untuk meningkatkan produk unggulan daerah yang direkomendasikan penelitian Balitbangda dan menjamin keempat produk unggulan tersebut dapat dikembangkan melalui integrasi industri inti dan penunjang, serta membentuk kluster inovasi dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan. Hasil penelitian tersebut juga dikomunikasikan ke gubernur dan kepala dinas terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki beberapa lembaga *think tank* dan perguruan tinggi. Salah satunya yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) UNHAS yang membantu penyusunan kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kawasan Timur Indonesia.

C. DESKRIPSI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan subnasional KSI di Sulawesi Selatan, diawali dengan menyelenggarakan tiga kegiatan di Makassar pada tanggal 16-17 Mei 2019, yaitu:

1. Temu wicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk memperkenalkan KSI dan berkonsultasi tentang prioritas kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Lokakarya pengembangan pengetahuan untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti: mendukung kebijakan prioritas di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pertemuan dengan media di Makassar untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan lembaga riset kebijakan mitra KSI, khususnya KPPOD, Seknas FITRA dan SMERU.

Tujuan Kegiatan

1. Mendorong dialog antara aktor-aktor sektor pengetahuan untuk mengidentifikasi ranah kolaborasi guna mendukung prioritas kebijakan di Sulawesi Selatan;
2. Membangun jaringan KSI dengan aktor sektor pengetahuan di Sulawesi Selatan; dan
3. Membangun agenda bersama dan ide-ide kerja sama yang potensial antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Riset Kebijakan mitra KSI dan aktor-aktor lain untuk penyusunan kebijakan publik berbasis bukti di Sulawesi Selatan.

Luaran Kegiatan

1. Aktor sektor pengetahuan di Sulawesi Selatan mendapatkan informasi dan tertarik untuk bekerja sama dengan program dan lembaga riset kebijakan mitra KSI;
2. Teridentifikasi prioritas-prioritas kerja sama yang potensial, antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lembaga riset kebijakan mitra KSI dan aktor pengetahuan lain, untuk mendorong penyusunan kebijakan publik berbasis bukti di Sulawesi Selatan.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Media Briefing – Ruang the Wrapped Hotel Four Points by Sheraton, 16 Mei 2019, pukul 16.30-19.00 WITA

Narasumber media briefing:

- Dr. Asep Suryahadi, Direktur Eksekutif SMERU
- Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
- Eryvn Kaffah, Manager Advokasi Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

Media Briefing dihadiri oleh 26 jurnalis (perempuan: 11, laki-laki: 15) dengan daftar media, liputan media, siaran pers dan presentasi narasumber terdapat di [Lampiran 1](#).

b. Temu Wicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan – Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 17 Mei 2019, pukul 09.00 WITA

Temu Wicara ini dihadiri oleh:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr, Gubernur Sulawesi Selatan

BAPPENAS

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas (Wakil Koordinator Pokja III KSI)

Ika Retna Wulandary, ST, MSc, Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis, Bappenas

Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kepala Sub Direktorat Ekonomi Kreatif, Bappenas

Feby Oldfisra, Staff Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas

Konsulat Jenderal Australia di Sulawesi Selatan

Richard Mathews, Konsul Jenderal

Aron Corbett, Wakil Konsul Jenderal

DFAT

Ria Arief, Unit Manager, *Poverty and Social Development*, DFAT

Agung Wasono, Senior Program Manager, *Poverty and Social Development*, DFAT

KSI

Retno Utaira, Acting Team Leader, KSI

Budiati Prasetiamartati, Lead Policy and Innovation Development, KSI

Budhi Bahroelim, Subnational Coordinator, KSI

Nabila Fachir, Communication, KSI

Policy Research Institute (PRI) KSI

Dr. Asep Suryahadi, Direktur Eksekutif SMERU

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

Forum KTI – BaKTI

Prof. Winarni Monoarfa, Ketua Pokja Forum KTI

M. Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif BaKTI

Zusanna Gosal, Deputy Direktur Eksekutif BaKTI

Temu Wicara diawali dengan perkenalan oleh Bapak Richard Mathews, Konsul Jenderal Australia di Sulawesi Selatan yang memperkenalkan seluruh peserta Temu Wicara serta menjelaskan tujuan pertemuan yaitu untuk memperkenalkan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan berkonsultasi dengan Gubernur tentang prioritas kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan menyambut baik rencana KSI untuk membangun agenda bersama dan ide-ide kerja sama yang potensial antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Riset Kebijakan mitra KSI dan aktor-aktor lain di Sulawesi Selatan untuk penyusunan kebijakan publik berbasis bukti. Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa prioritas, yaitu:

- Pengelolaan data, informasi dan pengetahuan sebagai dasar perencanaan kebijakan
- Kerja sama riset tentang mata rantai (*value chain*), perijinan dan tata kelola kebijakan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
- Pengembangan kolaborasi dan kerja sama investasi yang produktif untuk meningkatkan nilai tambah, pendapatan, kesempatan kerja bagi petani, peternak, dan nelayan.
- Reformasi Birokrasi

c. Lokakarya Pengembangan Pengetahuan untuk Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti: Mendukung Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan - Ruang The Wrapped Hotel Four Points by Sheraton, 16 Mei 2019, pukul 16.30-19.00 WITA

Lokakarya dihadiri oleh 98 peserta (33 perempuan, 65 laki-laki) yang berasal dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan perwakilan program DFAT lainnya di Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah catatan ringkas dari presentasi dan diskusi dari lokakarya ini.

Sesi Pertama: Sambutan dan Presentasi

- Sambutan dari Konsul Jenderal Australia, Bapak Richard Mathews

Bapak Konjen mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu yang diluangkan Bapak Gubernur pada pagi hari untuk Temu Wicara dengan tim Bappenas, DFAT, KSI, Konsulat Jenderal Australia, dan BaKTI terkait kebijakan berbasis bukti dan visi beliau untuk menggunakan keahlian atau aset yang sudah ada di Sulawesi Selatan untuk mendukung kebijakan

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

berbasis bukti. Dalam sambutannya, Bapak Konjen menjelaskan mengenai komitmen pemerintah Australia dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas.

- Presentasi Ibu Budiati Prasetiamartati – Lead Policy, Innovation and Development KSI mengenai Pengembangan Pengetahuan untuk Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Membangun Jejaring Sektor Pengetahuan.

Presentasi Ibu Budiati diawali dengan penjelasan mengenai KSI. Program KSI berbeda dengan program pendanaan luar negeri lainnya dimana pendekatan keseluruhan KSI adalah bertindak sebagai katalisator perubahan. Ini berarti bahwa tugas KSI berfokus pada menyatukan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan masalah, mengembangkan solusi bersama, dan bekerja sama untuk mengimplementasikannya. KSI bekerja dengan mitra untuk mengembangkan pengetahuan baru dan membagikannya dengan khalayak yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan perdebatan, dan memobilisasi dukungan yang lebih luas untuk perubahan. Untuk memastikan bahwa perubahan itu berkelanjutan, KSI bekerja untuk mendorong perubahan sistemik yang mendukung penggunaan bukti yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan. KSI mendorong kolaborasi seperti yang dilakukan pada Lokakarya ini. Peserta Lokakarya diundang untuk membangun kolaborasi dan menjadi pemimpin perubahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Disampaikan bahwa dari lokakarya ini diharapkan tersusun sebuah agenda bersama yang dapat dilaksanakan bersama komunitas pengetahuan di Sulawesi Selatan. Presentasi Ibu Budiati dapat dilihat pada [Lampiran 2](#)

- Presentasi Bapak Sumedi Andono Mulyo - Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas dan Wakil Ketua *Working Group III: Knowledge Collaboration* mengenai Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berbasis Riset dan Pengetahuan.

Bapak Sumedi mengawali presentasinya dengan pertanyaan: mengapa riset dan pengetahuan menjadi penting dalam pengambilan keputusan? Karena ada banyak sekali tantangan di masa depan yang harus kita hadapi, seperti demografi global, urbanisasi, perdagangan dan keuangan internasional, kelas menengah yang semakin meningkat, persaingan mendapatkan sumber daya alam, perubahan teknologi, perubahan iklim, perubahan geopolitik. Bappenas telah menyiapkan Visi 2045, yang menjelaskan bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Ini memerlukan dukungan pengetahuan dan kebijakan yang berbasis bukti. Melalui kerja sama pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dan dukungan dari mitra pembangunan lain, hal ini menjadi perhatian dimana *Knowledge Management* menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pak Sumedi menyampaikan ada empat pilar yang menjadi bagian dari Visi Indonesia 2045 yaitu: 1) Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pembangunan yang merata dan inklusif, 3) Ekonomi yang maju dan berkelanjutan, 4) Negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Posisi Sulawesi sangat strategis dan menjadi kunci pembangunan nasional. Perubahan infrastruktur semakin baik tetapi pengembangan modal sosial dan modal pengetahuan juga menjadi sangat penting. Presentasi Pak Sumedi dapat dilihat pada [Lampiran 3](#).

- Presentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Bappeda Sulawesi Selatan, Bapak Jufri Rahman terkait Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan RPJMD 2018-2022.

5 PROGRAM NYATA



Presentasi yang disampaikan Bapak Jufri dapat dilihat pada [Lampiran 4](#).

- Presentasi Ketua TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan-TGUPP) – Prof. Yusran Yusuf terkait Agenda Riset dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2022:

Pertanian berfokus pada komoditi unggulan (Sulsel mandiri dan sejahtera):

1. Pengembangan kakao
2. Pengembangan udang windu
3. Pengembangan budidaya rumput laut
4. Pengembangan budidaya ikan tuna
5. Hilirisasi pertanian untuk memberikan nilai tambah produk
6. Pengembangan peternakan

Pendidikan (Sulsel Cerdas):

1. Pendidikan karakter berbasis budaya/kearifan
2. Pendidikan kejuruan, khususnya SMK untuk peningkatan *skill, link and match* dengan kebutuhan industri dan mendukung pengembangan komoditi unggulan di Sulsel
3. Pengembangan sistem pembelajaran dan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi

Infrastruktur (Sulsel Terkoneksi)

1. Kajian membangun konektivitas wilayah terisolir
2. Kajian sistem penyiapan energi listrik untuk pulau dan daerah terisolir/terpencil
3. Penyediaan sumber air bersih untuk masyarakat pulau
4. Kajian Transportasi massal untuk Sulsel, termasuk Mamminasata & antar kabupaten dalam lingkup Sulsel, serta antar provinsi sepulau Sulawesi

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

5. Pengembangan pelabuhan dan bandara perintis untuk menunjang pemasaran komoditi unggulan dan akses pariwisata

Kesehatan (Sulsel Sehat)

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terpencil dan masyarakat pulau
2. Kajian pengembangan layanan unggulan untuk masing-masing Rumah Sakit milik pemerintah provinsi.
3. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan terpadu khusus untuk masyarakat pulau-pulau terluar.
4. Kajian sistem penuntasan penyakit menular di Sulsel
5. Kajian penuntasan stunting, gizi buruk dan gerakan 1000 hari emas untuk bayi

Pariwisata

Pengembangan pariwisata yang terpadu, pengembangan paket wisata, promosi wisata dan kesiapan masyarakat/sadar wisata. Fokus wisata di Sulsel antara lain berbasis budaya di Toraja dan Somba Opu, pariwisata pantai di Bira & Selayar, dan pariwisata berbasis alam di Malino, Bantaeng, Bantimurung, Rammang-Rammang di Maros.

Reformasi Birokrasi (Sulsel Bersih Melayani)

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan pendekatan berbasis IT, kajian struktur organisasi untuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pengembangan mall pelayanan publik, dan penyederhanaan izin.

Pelestarian Lingkungan

Pembangunan rendah karbon, pelestarian DAS kritis yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang, kajian pola rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat, pelestarian Danau Tempe dan Danau Matano

Sesi Kedua: Tanggapan umum atas paparan prioritas kebijakan Sulawesi Selatan sekaligus identifikasi potensi terobosan yang bisa dilakukan

Tanggapan umum disampaikan oleh SMERU, KPPOD, Seknas FITRA, dan Ketua Pokja Forum KTI.

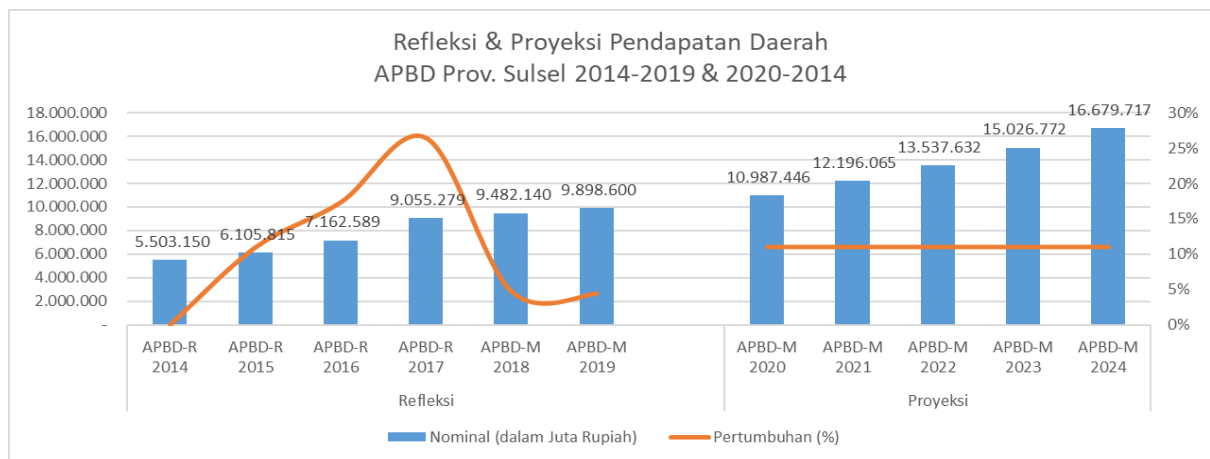
- Bapak Asep Suryahadi, Direktur SMERU memberikan apresiasi pada presentasi Bapak Jufri Rahman, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan Prof. Yusran Yusuf, Ketua TGUPP, dimana dalam kedua presentasi tersebut telah menyebutkan kata inklusif. Pak Asep menyampaikan pentingnya pembangunan inklusif, dimana pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa jika pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, akan terjadi peningkatan ketimpangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat menikmati hasil pembangunan. Tahun 2018, SMERU mengujicoba penggunaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai alat kebijakan di Sulawesi Selatan.

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

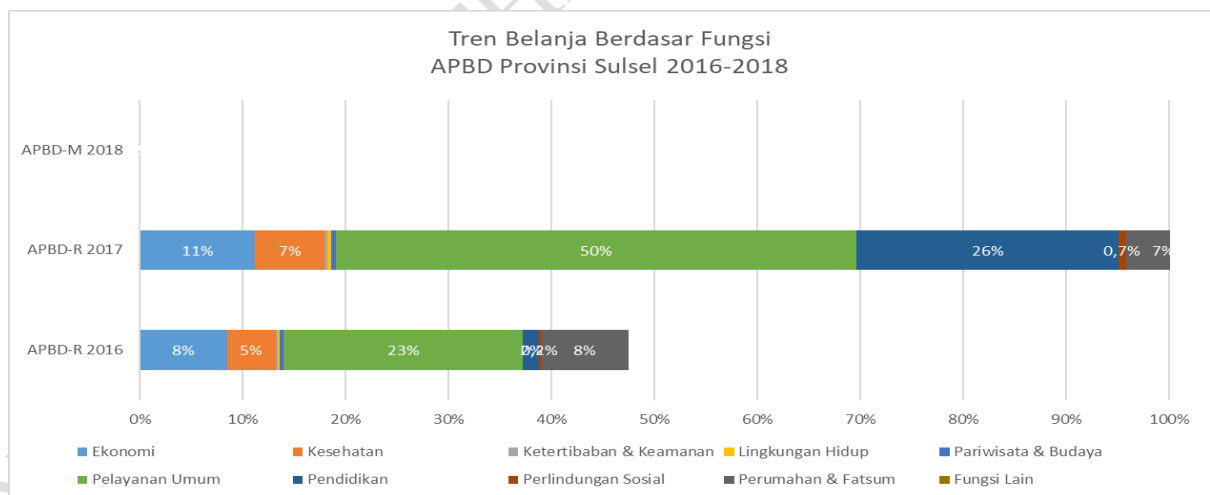
Hasilnya, secara nasional, Sulawesi Selatan berada pada posisi ke-12 dalam urutan inklusifitas dari pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan. Posisinya di tengah dan tidak jelek, tetapi masih banyak yang bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan.

- Bapak Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan perlu melihat kerangka pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Spasial perlu diutamakan, dimana lokasi, apa masalah tipologi dan apa yang menjadi tematik pembangunan. Aspek kewilayahan dan konteks lokal perlu menjadi perhatian provinsi. Jika spasial/lokasinya jelas, strategi fokus menjadi penting – hanya dua atau tiga sektor menjadi *prime mover* dan kemudian mengintegrasikan berbagai daya dukung - sumber daya agar bisa mencapai tujuan. Data spasial sangat penting. Selain itu, kolaborasi penting untuk dibangun, tidak hanya pemerintah saja. Perlu mendudukkan dunia usaha menjadi pelaku penting dalam pembangunan. RKPD tidak hanya berbasis APBD, tetapi juga non-APBD dimana pembangunan melibatkan pihak lain termasuk dunia usaha. KPPOD juga mengembangkan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah untuk melihat apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha (termasuk usaha kecil dan menengah) dan apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah dari sisi kebijakan, desain kelembagaan hingga pelayanan. Indeks tersebut mencakup 10 indikator yang penting buat dunia usaha. Dari 10 indikator tersebut, ada 3 indikator di bawah kontrol pemerintah daerah yaitu birokrasi perijinan, biaya transaksi (pajak, retribusi dan biaya tidak resmi) dan kepastian hukum/regulasi. Pemerintah daerah mempunyai posisi yang sangat kuat untuk memastikan dunia usaha dapat memulai usaha dengan mudah. Dalam rangka memperoleh gambaran local-specific per daerah dan memadukan keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan ekonomi (terutama usaha skala mikro dan kecil), pemetaan (mapping) dan pengukuran indeks tata kelola ekonomi daerah (local economic governance index) perlu dilakukan di semua kab/kota di Propinsi Sulsel. Hal ini akan menjadi dasar bagi provinsi untuk memberikan dukungan pada prioritas Kabupaten/Kota, yang berbasis bukti kinerja dan sesuai jenis permasalahan yang ada.
- Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menyampaikan bahwa Seknas FITRA bekerja sama dengan LSM di Sulsel mengembangkan Local Budget Index. Indeks ini mengukur tata kelola pemerintah daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan sensitif gender. Dari 70 kabupaten/kota di Indonesia yang diteliti FITRA tahun 2017, ada 6 kabupaten di Sulsel yang diukur indeksinya seperti Bone, Maros, Sinjai, Parepare, dan lainnya. Rata-rata tingkat keterbukaan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah berada di tengah kecuali Kabupaten Bone yang berada di peringkat 3 besar.

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION



Terkait pengelolaan anggaran, bila rata-rata pertumbuhan 11% digunakan untuk Proyeksi APBD 2020-2024, artinya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel harus bekerja keras untuk mencapai Nominal Pendapatan Rp 16,6 Triliun pada 2024. Dari sisi Belanja Daerah, beberapa Belanja mandatori belum sepenuhnya ditunaikan oleh Pemprov Sulsel, misalnya Belanja Fungsi Kesehatan, baru 7% dari total Belanja Daerah, padahal mandatnya minimal 10% di luar gaji pegawai. Sedang untuk Belanja Fungsi Pendidikan sudah di atas 20%. Yang masih relatif kecil adalah Belanja untuk Fungsi Perlindungan Sosial, hanya 0,7% dari Total Belanja Daerah. Belanja inilah yang perlu lebih ditingkatkan ke depannya. Dalam tanggapannya, Bapak Misbah menyampaikan sebuah presentasi singkat yang dapat dilihat pada [Lampiran 5](#).



- Tanggapan terakhir dari Ibu Winarni Monoarfa, Ketua Pokja Forum KTI yang menyampaikan peran Forum KTI dalam sektor pengetahuan. Beliau menyampaikan bagaimana peran Forum KTI dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik-praktik cerdas sebagai bukti pembangunan yang sudah berhasil dan layak untuk disebarluaskan sehingga dapat diadaptasi oleh daerah lain sehingga pembangunan dapat menjadi lebih efektif. Selain itu beliau juga menyampaikan peran JiKTI (Jaringan Peneliti KTI) dan Forum Kepala Bappeda

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

Provinsi Se-KTI sebagai sub forum dari Forum KTI dalam pengembangan sektor pengetahuan di Kawasan Timur Indonesia.

Sesi Ketiga: Diskusi Kelompok

Peserta lokakarya dibagi ke dalam tiga kelompok untuk mendiskusikan agenda bersama untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti di Sulawesi Selatan. Para penanggap dari SMERU, Seknas FITRA dan KPPOD, juga bergabung dalam diskusi kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai co-fasilitator untuk mendiskusikan empat pertanyaan, yaitu:

1. Di antara banyak prioritas yang telah dibicarakan, prioritas manakah yang punya daya ungkit paling besar?
2. Kapasitas dan aset pengetahuan apa yang telah dimiliki Sulawesi Selatan dan dapat dimanfaatkan?
3. *Knowledge gap* apa yang perlu diisi?
4. Potensi prioritas lain yang memiliki basis pengetahuan yang perlu diperhatikan?

Perwakilan masing-masing kelompok, kemudian mempresentasikan hasil-hasil diskusi tiap kelompok yang terangkum di bawah ini.

Prioritas yang mempunyai daya ungkit besar

1. Upaya pengembangan komoditas-komoditas lokal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ke arah industrialisasi menjadi salah satu perhatian utama peserta lokakarya. Hasil-hasil utama dari Sulawesi Selatan berasal dari pertambangan nikel, pertanian, perkebunan dan hasil perikanan laut. Hasil pertambangan nikel diekspor sebagai bahan mentah, sehingga belum ada manfaat dari pengolahannya bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Walaupun Sulawesi Selatan kaya dengan hasil bumi dan mempunyai pasarnya, tetapi pengolahannya masih harus dilakukan di tempat lain. Karena itu perlu dikembangkan industri pengolahan yang bertumpu pada hasil pertanian, perkebunan dan perikanan setempat, termasuk *branding*, pengepakan, strategi pemasaran, aspek gender dan sebagainya. Salah satu komoditas potensial lain yang disebutkan adalah garam. Potensi garam di Kabupaten Jeneponto cukup besar, tapi selama ini belum dikembangkan dan secara nasional kita masih mengimpor garam. Komoditas unggulan perlu diidentifikasi dan didukung melalui kebijakan, penganggaran dan sistem penunjang dan tata kelola yang baik. Hal ini juga mengemuka dalam Temu Wicara dengan Gubernur Sulsel, dimana beliau menggaris bawahi pentingnya riset *value-chain*, perijinan dan tata kelola untuk mendorong industri berbasis komoditas lokal. Terkait tata kelola, KPPOD telah melakukan pengukuran indeks tata kelola ekonomi daerah di tingkat provinsi se-Indonesia yang dapat dikembangkan pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan gambaran spesifik setiap daerah dan memadukan keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan ekonomi (terutama usaha skala mikro dan kecil). Hal ini akan menjadi dasar yang penting bagi provinsi untuk memberikan dukungan pada prioritas kabupaten/kota sesuai jenis permasalahan yang ada.

2. Upaya pengembangan industri lokal ini, perlu didukung dengan penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) UKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di daerah dan harus diberdayakan melalui kerja sama tidak saja dengan pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Upaya-upaya untuk menyalurkan produk UKM ke pasar melalui pembangunan mini-gallery perlu dikembangkan. Di samping itu, UKM juga perlu dibantu untuk menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam pemasaran produknya. Pengembangan UKM juga sangat terkait dengan aspek gender, dimana sangat banyak perempuan yang menyandarkan penghidupannya dari usaha kecil berbasis rumah tangga.
3. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, di samping memerlukan investasi yang besar, juga memerlukan kesiapan tenaga kerja yang handal. Sehingga upaya pengembangan industri tersebut harus terkoordinasi dengan pendidikan kejuruan yang ada di Sulawesi Selatan, supaya sekolah kejuruan setempat dapat menyediakan tenaga kerja yang sesuai. Sebaliknya, lulusan sekolah kejuruan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keahliannya.
4. Pengelolaan dan Pemutakhiran Data yang Berkualitas – Upaya-upaya untuk memperbaiki pengelolaan dan pemutakhiran data merupakan salah satu prioritas yang banyak diusulkan. Misalnya, data kemiskinan yang digunakan Pemda harus terpilah menurut gender, agar proses perencanaan dan penganggaran program pengentasan kemiskinan yang diusulkan dapat merespons kebutuhan dan sensitif pada kebutuhan kelompok yang rentan seperti kelompok disabilitas. Apalagi sejumlah penelitian menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam statistik kemiskinan di Sulawesi Selatan. Lebih jauh diusulkan juga agar data dasar dilengkapi dengan data spasial (*by name by address*), supaya lokasi dan target intervensi dapat dipetakan, sehingga pelaksanaan program tepat sasaran. Basis data yang baik akan memudahkan dalam monitoring dan evaluasi program yang menyangkut berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan sebagainya.
5. Ketimpangan yang makin nyata – Dalam sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan berkurang sedikit saja, sedangkan ketimpangan justru meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan SMERU, bahwa masih banyak yang dapat dilakukan di Sulawesi Selatan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
6. Sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi – Di satu sisi penyusunan dokumen perencanaan sudah dilakukan, tetapi di sisi lain masih terdapat tantangan dalam proses penganggarannya. Masih sering ditemui program prioritas terhenti pada tahap perencanaan saja karena tidak dapat dilaksanakan akibat ketiadaan anggaran yang dialokasikan pada prioritas lain. Misalnya perlu dipastikan penganggaran untuk upaya pengentasan kemiskinan dan industrialisasi komoditas unggulan lokal. Seknas FITRA banyak menyelenggarakan kajian untuk meningkatkan transparansi anggaran dan meningkatkan literasi publik tentang proses penganggaran.
7. Dana Desa dan Pembangunan Desa – Dari tahun ke tahun, jumlah dana yang dialokasikan pada setiap desa terus meningkat dan dapat mencapai dua milyar rupiah perdesa. Namun

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

demikian, dampaknya pada peningkatan kesejahteraan di desa belum signifikan, karena ada berbagai kendala. Di antaranya adalah proses perencanaan desa yang didominasi oleh elit desa, belum berdasarkan bukti dari penelitian dan kebutuhan nyataarganya. Proses perencanaan tingkat desa perlu dikawal dan diperkuat.

Kapasitas dan Aset Pengetahuan yang telah dimiliki

- Pengetahuan dan kearifan lokal yang telah dimiliki masyarakat Sulawesi Selatan. Di antaranya praktik *Tudang Sipulung* (konsultasi non-formal) perlu dibudayakan kembali untuk merangkul lebih banyak aspirasi masyarakat guna mengoptimalkan berbagai potensi yang ada dalam komunitas.
- Di Sulawesi Selatan terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Balitbangda Kabupaten/Kota yang aktif melaksanakan penelitian. Juga terdapat perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin yang mempunyai banyak pusat studi yang relevan, seperti P3KM dan SDGs Center. Kantor LAN di Makassar juga aktif melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
- Riset tentang industrialisasi garam rakyat telah dilaksanakan Unhas tahun 2017-2018 dengan pendanaan Kemenristekdikti.

Knowledge Gap yang perlu diisi

- Perlu upaya untuk sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dari desa, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.
- Bagaimana menyelaraskan riset yang dilakukan perguruan tinggi dengan prioritas pembangunan daerah atau sebaliknya.
- Melaksanakan kajian evaluasi kebijakan dan program kerja Pemda secara teratur untuk menjadi masukan pada tahun berikutnya.
- Riset mengenai pengembangan komoditas unggulan lokal, perlu dilaksanakan bersama pemerintah, petani/nelayan, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Potensi lain yang memiliki basis pengetahuan

- Pemerintah daerah, perguruan tinggi, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil harus didorong untuk bekerja sama dalam riset kebijakan dan pengembangan pengetahuan. Di antaranya dengan mendorong kerja sama organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dalam riset kebijakan dengan model Swakelola Tipe III yang diatur dalam Peraturan Presiden 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Di samping itu, riset kolaboratif yang melibatkan banyak aktor dan memungkinkan pendanaan tahun jamak juga dimungkinkan dalam Hibah Riset Kemenristekdikti yang dibuka setiap tahun.
- Perusahaan *startup* yang melibatkan generasi muda berbasis teknologi informasi merupakan potensi yang harus diajak bekerja sama. Misalnya untuk memajukan UKM yang memproduksi makanan di skala rumah tangga dan mendorong kewirausahaan berbasis teknologi.

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

- Pengembangan desa pariwisata perlu dibarengi dengan pembangunan industri kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, tidak saja dengan dukungan pemerintah tetapi juga bermitra dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
- Kerja sama multipihak dan lintas sektor – Kerja sama dan koordinasi sudah lama menjadi istilah yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Diperlukan terobosan nyata untuk membentuk jaringan dan mendorong komunikasi antar aktor dan lintas sektor, sehingga dapat terbangun sinergi antara berbagai keahlian, pengetahuan, dan sumber daya yang telah dimiliki. Perlu dikembangkan suatu Forum komunikasi pemangku kepentingan atau forum komunikasi publik secara rutin agar ada keterbukaan.

Penutupan Lokakarya

Menutup pelaksanaan lokakarya, Pak Sumedi menyampaikan apresiasi atas sambutan dan partisipasi yang baik dari para peserta lokakarya yang penuh semangat memberikan ide-ide dan masukan yang sangat berguna untuk lebih lanjut merancang kegiatan KSI di Sulawesi Selatan. Ini mencerminkan semangat kolaborasi yang menjadi suatu kunci penting dari lokakarya ini. Semoga kita bisa meneruskan semangat kolaborasi ini ke depan, khususnya saat rasa persatuan kita agak tergerus setelah pesta demokrasi. Kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Daerah, SKPD, aktivis, perguruan tinggi, petani dan aktor pengetahuan lainnya juga diperlukan untuk mendobrak *mindset* dan perilaku yang menghambat.

Hasil-hasil pertemuan ini akan dirumuskan dan dikomunikasikan kepada stakeholder di Sulawesi Selatan, termasuk mengenai tindak lanjut kegiatan KSI di Sulawesi Selatan.

E. RENCANA TINDAK LANJUT OLEH KSI

KSI sangat mengapresiasi sambutan baik dan dukungan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara.

Catatan dari lokakarya di atas memperlihatkan adanya irisan prioritas yang disampaikan pemerintah daerah, masukan dari peserta lokakarya dan tanggapan dari PRI mitra KSI. Hal ini menjadi masukan bagi KSI untuk merancang kegiatan lebih lanjut di Sulawesi Selatan, dengan memperhatikan dokumen sub-strategi sub-nasional, kesamaan tujuan dengan mitra-mitra yang relevan dan ketersediaan sumber daya.

Rencana kegiatan-kegiatan KSI di Sulawesi Selatan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- Kegiatan terkait agenda prioritas Sulawesi Selatan, sebagai tindak lanjut lokakarya di Makassar.
- Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya KSI dalam mendorong perubahan sistemik sektor pengetahuan di tingkat nasional yang berdampak pada tingkat subnasional, di antaranya terkait pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Swakelola Tipe III, Perpres 16/2018), jabatan fungsional analis kebijakan bagi ASN, profesi analis kebijakan bagi non-ASN dan sebagainya.

DRAFT REPORT FOR PROCUREMENT PROCESS ONLY – NOT FOR FURTHER CIRCULATION

Di samping itu, sejumlah PRIs juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di Sulawesi Selatan dengan dukungan KSI.

Untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan sebuah lembaga pelaksana di Sulawesi Selatan untuk menjalankan peran katalitik KSI. Lembaga ini sedang dipilih melalui suatu proses pengadaan pada bulan Juli 2019.

NOT FOR FURTHER CIRCULATION